PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP TOTAL PEMANFAATAN ASET DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat)

Oleh:
Ginanjar[1)]
ginanjargooner@gmail.com[1)]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted in the Local Cities and District Government in West Java on 2014 Period. The phenomenon encountered in the field is the embodiment of autonomy in the form of asset management that gave a less improvement to the local own-source revenue.

The objective of this study is to determine how much influence the asset management to the total utilization of municipal assets and its implications for local own-source revenue Cities and District Local Government in West Java.

Research method that used in this research were descriptive and verification method with statistical testing using Path Analysis with secondary data. Sampling method used is to take all of population called census.

The results showed that asset management carried an impact on the total utilization of municipal asset with positive direction, means the better asset management, the higher total asset utilization get. While the total utilization of municipal assets affect the local own-source revenue with a positive direction, that mean the higher total utilization of municipal asset get, the local own-source revenue will also increase. Then the mutual effect on Local Own-Source revenue effect of 49.1%.

Keywords: Asset Management, Total Utilization of Municipal Asset, Local Own-Source Revenue.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Pemerintah Pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Krisindarto, 2012). Kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil (Tamboto et al., 2014).

Kewenangan yang diberikan berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan manajemen aset (Jusmin, 2013). Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya atau terdepresiasi seiring waktu (Veronika & Tangkuman, 2014). Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Aira, 2014).

Adapun kondisi di lapangan yang diperoleh, Pada Mei 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat melaporkan kurang efektifnya pengelolaan aset Pemkot Bandung, Pemerintah Kota Bandung memliki aset berupa tanah dan bangunan yang bermasalah senilai Rp. 3,6 triliun karena luasannya tidak diketahui atau sertifikasi aset nya tidak jelas (Cornell Syarief, 2014). Aset senilai Rp 3,6 triliun yang tidak dilengkapi luasannya itu merupakan bagian dari aset senilai Rp 4 triliun yang tidak didukung oleh informasi memadai, selain tidak mencantumkan luasan, aset-aset tersebut juga ada yang tidak disertai alamat serta tidak disertai alamat dan luasan (Cornell Syarief, 2014). Nilai aset yang tak beralamat mencapai Rp 185,5 miliar. Jadi, ada aset yang dicatat, tetapi masih harus dicari gedung dan lahannya di mana.

Permasalahan manajemen aset lainnya yaitu mengenai legalitas kepemilikan aset, kepala DPKAD Kota Bandung menyatakan pada Desember 2013 terhitung kurang lebih 90% aset Kota Bandung belum tersertifikasi di antaranya terdapat pada bangunan-bangunan peninggalan Belanda, daerah perluasan dan daerah otonomi kota. Pemkot Bandung kesulitan memperoleh hak kepemilikan bangunan peninggalan Belanda karena bukti kepemilikannya sulit ditelusuri, Siapa yang menguasai fisik, itu yang diprioritaskan (Ahmad Rekotomo, 2013). Padahal dengan aset yang dimiliki, Kota Bandung seharusnya bisa lebih mengoptimalkan asetnya tersebut. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Aset yang dimiliki sangat potensial untuk bisa dimaksimalkan dalam pengertian untuk bisa memenuhi kebutuhan fiscal kita dalam menata Kota Bandung baik infrastruktur, ekonomi maupun sosial (Edi Siswadi, 2010).

1.1. Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh manajemen aset yang terhadap total pemanfaatan aset daerah.
2) Seberapa Besar pengaruh total pemanfaatan aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3) Seberapa Besar Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4) Seberapa Besar Hubungan manajemen aset terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami teori-teori yang didapat dalam data dan/atau informasi yang diperoleh serta mengetahui bagaimana implementasi kegiatan manajemen aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat dapat mempengaruhi total pemanfaatan aset daerah dan implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui pengaruh manajemen aset terhadap total pemanfaatan aset daerah.
2) Untuk mengetahui pengaruh total pemanfaatan aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3) Untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD.)
4) Untuk mengetahui seberapa besar hubungan manajemen aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.3. Kegunan Penelitian

1.3.1. Kegunaan Praktis

1. Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada proses implementasi manajemen aset daerah. Berdasarkan teori dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena kurang maksimalnya pendapatan asli daerah karena kurang baiknya pengelolaan aset daerah bisa diperbaiki.
2. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pelaksanaan manajemen aset baik itu untuk organisasi pemerintahan maupun organisasi lainnya.

1.3.2. Kegunaan Akademis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembangan ilmu di bidang akuntansi sektor publik serta untuk menemukan masalah baru serta pemecahannya mengenai manajemen aset pada sektor pemerintahan.

2. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Manajemen Aset

Menurut Olga Kaganova & Mihaly Kopanyi dalam Catherine Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi (2014:276), menjelaskan manajemen aset pemerintah daerah sebagai berikut:

> *"Municipal asset management is a process of making decisions and implementing them regarding operating, maintaining, refurbishing, acquiring, or developing physical assets cost-eff ectively, with the ultimate objective of providing the best possible service to local citizens."*

Menurut Siregar (2004:518) menyebutkan bahwa tahapan kerja manajemen aset dibagi dalam lima tahap kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan lainnya, yaitu Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, Optimalisasi Aset dan Pengawasan & Pengendalian.

Dengan membandingkan total aset yang dimiliki dengan jumlah pengelolaan aset yang kurang memadai hasil dari pemeriksaan BPK RI berupa permasalahan-permasalahan Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, Optimalisasi Aset dan Pengawasan & Pengendalian akan terlihat seberapa besar aset yang sudah dikelola dengan memadai.

2.1.2. Total Pemanfaatan Aset Daearah

Menurut Hamzah & Djohansjah (2010:5) dalam modul pemanfaatan aset/ barang milik daerah, menjelaskan Pemanfaatan aset/barang milik daerah adalah optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah guna mendorong peningkatan penerimaan daerah. Pendayagunaan barang milik daerah dilakukan melalui bentuk-bentuk pemanfaatan yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.

Dijelaskan pula pola pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yaitu berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim & Kusufi (2012:101) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dalam Ahman & Indriani (2007:46) , menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Hubungan Manajemen Aset Terhadap Total Pemanfatan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pelaksanaan manajemen aset harus berdasarkan pada 6 asas, asas tersebut antara lain asas kepastian nilai. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik negara serta penyusunan neraca pemerintah. Dengan terpenuhinya asas kepastian nilai ini, maka optimalisasi pemanfaatan aset milik Daerah dan penerimaan daerah akan semakin baik sejalan dengan pengelolaan aset yang baik pula.

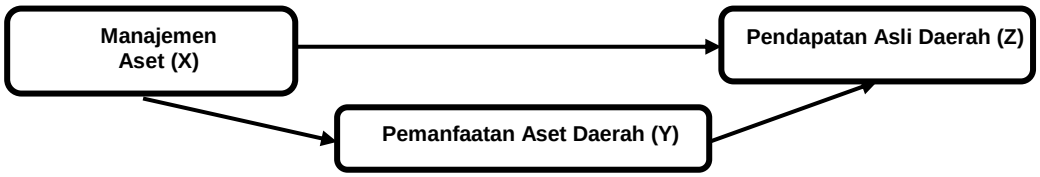
2.2.2. Hubungan Total Pemanfaatan Aset Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2010:151), menjelaskan pemanfaatan aset daerah disamping bertujuan untuk mendayagunakan aset milik daerah juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan mengurangi beban anggaran.

2.2.3. Hubungan Manajemen Aset Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara manajemen aset terhadap pendapatan asli daerah dijelaskan dalam Olga Kaganova & Mihaly Kopanyi dalam Catherine Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi (2014:280). *No municipality would exist or survive without a sufficient portfolio of assets, which it needs to fulfill its various vital functions*. *The main reasons why managing assets should be central to local governments are …* source of revenue, *Government property and asset can be a major source of revenues, whether one-time, as a sale of surplus property, or recurrent, including leasing land and commercial properties or granting concessions for operating municipal parking lots.*

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 :Manajemen Aset berpengaruh terhadap Total Pemanfatan Aset Daerah.
H2 :Total Pemanfaatan Aset Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
H3 : Manajemen Aset Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah
H4 :Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah berpengaruh Pendapatan Asli Daerah.

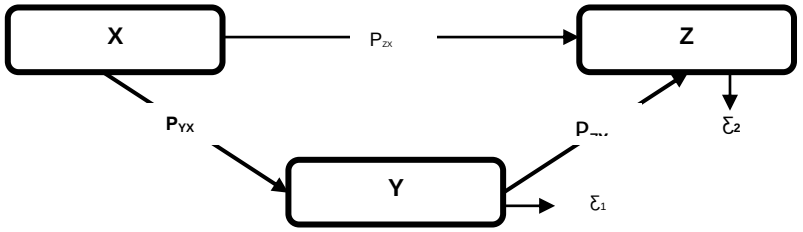
3. Metodologi Penelitian

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan signifikansi antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

metode deskriptif dan verifikatif bertujuan untuk menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada serta menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang diteliti dengan cara menumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterprestasikan data dalam pengujian hipotesis.

Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*), teknik analisis jalur ini digunakan dalam menguji besarnya contribution yang ditunjukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan klausal antar variabel X1 Dan/atau X2 dan seterusnya terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Model Analisis Jalur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Model Analisis Jalur

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LHP LKPD (Laporan Hadil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun anggaran 2014, dengan mengambill sampel sensus atau jenuh yaitu mengambil pengambilan sampel dari semua anggota populasi, yaitu 27 LHP LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Manajemen Aset (X)	*Municipal asset management is a process of making decisions and implementing them regarding operating, maintaining, refurbishing, acquiring, or developing physical assets cost-eff ectively, with the ultimate objective of providing the best possible service to local citizens.* (Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi .2014:276)	Inventarisasi Legal audit Penilaian Opitmalisasi aset Pengawasan dan pengendalian Siregar (2004:518)	Rasio
Total Pemanfaatan Aset Daerah (Y)	Pemanfaatan aset daerah merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan. (Hasfi et al, 2013)	Total penerimaan dari pemanfaatan barang milik daerah daerah berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna Mahmudi (2010:158)	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Z)	Pendapatana Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal daei sumber ekonomi asli daerah. (Halim & Kusufi, 2012:101)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Halim & Kusufi, 2012)	Rasio

3.3. Tenik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan
   a Pengamatan (*Observation*)
   b Dokumentasi (*Documentation)*
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

3.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah LHP LKPD (Laporan Hasil Pemerikasaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Hasil Analisis Deskriptif
4.1.1.1. Hasil Analisis Deskriptif Manajemen Aset

Tabel 2: Implementasi Manajemen Aset TA 2014
27 Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No.	Instansi	Hasil Pengelolaan Aset yang Kurang Memadai (Rp.)	Total Aset (Rp.)	Aset Yang Dikelola dengan Memadai
1	Kabupaten Bandung	146,131,023,943.00	8.866.342.222.287,58	98.35%
2	Kabupaten Bandung Barat	1,946,634,006,772.00	4.623.427.540.393,34	57.90%
3	Kabupaten Bekasi	2,152,522,585,722.00	11.945.826.702.258,90	81.98%
4	Kabupaten Bogor	135,739,013,234.69	18.168.758.328.991,00	99.25%
5	Kabupaten Ciamis	998,651,064,038.33	3.579.137.338.463,73	72.10%
6	Kabupaten Cianjur	556,085,142,220.00	5.019.727.453.814,68	88.92%
7	Kabupaten Cirebon	116,668,518,559.27	3.881.890.021.889,73	96.99%
8	Kabupaten Garut	552,227,303,016.00	3.966.764.515.560,68	86.08%
9	Kabupaten Indramayu	2,698,894,767,015.00	4.604.394.610.965,58	41.38%
10	Kabupaten Karawang	951,801,752,983.11	5.592.497.171.595,24	82.98%
11	Kabupaten Kuningan	1,530,259,114,338.01	2.363.359.345.752,52	35.25%
12	Kabupaten Majalengka	519,123,404,326.08	4.145.928.277.813,08	87.48%
13	Kabupaten Pangandaran	60,255,534,572.00	1.353.819.507.370,28	95.55%
14	Kabupaten Purwakarta	270,415,580,426.00	2.238.401.002.560,49	87.92%
15	Kabupaten Subang	784,295,637,162.00	4.474.138.024.624,32	82.47%
16	Kabupaten Sukabumi	32,474,272,410.00	4.650.491.921.373,21	99.30%
17	Kabupaten Sumedang	48,054,864,425.45	3.107.278.084.406,45	98.45%
18	Kabupaten Tasikmalaya	11,778,351,971.00	4.287.140.779.583,76	99.73%
19	Kota Bandung	22,000,028,099,513.50	25.247.736.636.747,00	12.86%
20	Kota Banjar	2,531,233,954.02	1.719.988.056.191,40	99.85%
21	Kota Bekasi	1,149,984,574,118.00	7.776.755.170.073,43	85.21%
22	Kota Bogor	238,942,372,024.28	6.263.429.999.065,65	96.19%
23	Kota Cimahi	5,081,010,019.00	2.218.543.225.767,84	99.77%
24	Kota Cirebon	236,016,407,420.00	3.373.856.254.013,82	93.00%
25	Kota Depok		8.198.084.298.261,30	100.00%
26	Kota Sukabumi	240,991,716.00	1.962.304.218.698,00	99.99%
27	Kota Tasikmalaya	55,412,726,221.00	3.799.596.475.799,70	98.54%
			Rata-rata	84.35%

Sumber: LHP LKPD Pemerintah Daerah (Data Telah Diolah)

Manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah, merupakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa seefektif dan seefisien mungkin dalam mengelola aset atau barang milik daerah.

Dengan membandingkan hasil pemeriksaan BPK RI mengenai jumlah aset yang dikelola kurang memadai dengan total aset yang dimiliki suatu pemda dapat diliat seberapa besar aset yang telah dikelola dengan memadai. Dari hasil penelitain dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat terdapat 4 Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah aset yang dikelola

dengan memadainya paling rendah atau dengan kata lain memiliki banyak aset yang bermasalah, yaitu antara lain Kab. Bandung Barat (57,90%), Kab. Indramayu (41,38%), Kab. Kuningan (35,25%) dan Kota Bandung (12.86%).

Pemda Kota Bandung memilki paling banyak aset yang tidak dikelola dengan memadai, menurut laporan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung memiliki asset senilai Rp. 22.000.028.099.513,50 yang bermasalah. Permasaahan yang menjadi sorotan utama Pemkot Bandung yaitu masalah inventarisasi dan pencatatan nilai asset, banyak asset-aset miliki Pemkot bandung yang tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas mulai dari informasi lokasi, luasan aset hingga masalah legalitas. Permasalahan pada pengelolaan aset yang banyak ini pula yang menjadi pertimbangan BPK tidak memberikan opini WTP untuk LKPD pemkot Bandung pada tahun anggaran 2014.

Sedangkan untuk Pemerintah Kota Depok dari total aset sebesar Rp. 8.198.084.298.261,30 BPK RI tidak menemukan permalahan untuk pengelolaan aset. Hal ini juga tercermin pada opini BPK RI terhadapa LKPD Kota Depok yang memberikan opini WTP untuk tahun anggaran 2014. Untuk pemerintah daerah lain yang memiliki jumlah aset bermasalah dengan jumlah yang kecil yaitu Pemkab Sukabumi, Pemkab Sumedang, Pemkab Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Sukabumi juga mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya. Manajemen aset merupakan salah satu poin penting penilaian dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI).

4.1.1.2. Hasil Analisis Deskripsi Total Pemanfaatan Aset Daerah

Tabel 3: Total Pemanfaatan Aset Daerah
27 Pemerintah Daerah di Jawa Barat

Instansi	Sewa	Bangun Guna Serah	Bangun Serah Guna	Kerjasama Operasional	Total Pemanfaatan Aset Daerah
Kabupaten Bandung	385.096.000,00	-	-	106.976.890.950	107.361.986.950,00
Kabupaten Bandung Barat	298.000.000,00	-	-	33.731.757.007	34.029.757.007,00
Kabupaten Bekasi	1.201.575.000,00	-	-	127.640.553.916	28.842.128.916,00
Kabupaten Bogor	3.308.573.371,00	-	-	96.496.051.873	99.804.625.244,00
Kabupaten Ciamis	1.062.664.880,00	-	-	21.064.984.477	21.064.984.477,00
Kabupaten Cianjur	-	-	-	38.252.728.672	38.252.728.672,00
Kabupaten Cirebon	988.447.501,00	-	-	33.994.283.836	34.982.731.337,00
Kabupaten Garut	670.139.038,00	-	-	48.632.030.780	49.302.169.818,00
Kabupaten Indramayu	2.506.478.633,00	-	-	93.511.576.672	96.018.055.305,00
Kabupaten Karawang	375.000.000,00	-	-	76.109.279.819	76.484.279.819,00
Kabupaten Kuningan	-	-	-	34.358.332.979	34.358.332.979,00
Kabupaten Majalengka	28.650.000,00	-	-	47.748.398.296	47.777.048.296,00
Kabupaten Pangandaran	-	-	-	15.798.866.976	15.798.866.976,00
Kabupaten Purwakarta	-	-	-	34.798.826.395	34.798.826.395,00
Kabupaten Subang	195.700.760,00	-	-	83.914.590.168	84.110.290.928,00
Kabupaten Sukabumi	50.268.986,33	6.014.500.000,00	-	82.477.030.671	88.541.799.657,33
Kabupaten Sumedang	-	-	-	33.701.792.922	33.701.792.922,00

Kabupaten Tasikmalaya	108.684.350,00	-	-	35.564.562.057	35.673.246.407,00
Kota Bandung	20.046.716.845,33	-	-	33.086.394.849	53.133.111.694,33
Kota Banjar	3.952.000,00	-	-	34.435.656.226	34.439.608.226,00
Kota Bekasi	8.232.549.415,00	-	-	52.906.482.239	61.139.031.654,00
Kota Bogor	308.550.000,00	-	-	34.749.090.964	35.057.640.964,00
Kota Cimahi	1.783.184.970,00	-	-	33.056.068.849	34.839.253.819,00
Kota Cirebon	54.831.000,00	-	-	36.004.271.032	36.059.102.032,00
Kota Depok	279.267.695,00	305.000.000,00	-	36.144.851.044	36.729.118.739,00
Kota Sukabumi	2.833.404.520,00	-	-	33.165.334.177	35.998.738.697,00
Kota Tasikmalaya	54.750.000,00	-	-	33.083.883.976	33.138.633.976,00

Dari tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil dari Total Pemanfaatan Aset Daerah oleh Pemkab Bandung, Pemkab Bogor dan Pemkab Indramayu merupakan yang tertinggi jika dilihat dari perbandingan nominalnya, namun jika dibandingkan dengan jumlah total aset yang dimiliki tiap Pemda. Pemkab Indramayu merupakan yang paling banyak memanfaatkan aset daerah mereka yang idle yaitu sebanyak 2,09% dari total aset, lalu Kota Banjar sebesar 2%, pola pemanfaatan aset daerah yang paling dominan adalah pola kerjasama operasional, sedangkan untuk Bangun guna serah dan bangun serah guna, pola pemanfaatan kerjasamanya memakan waktu yang lama untuk dapat diterima penerimaannya. untuk Pemkab Pangandaran, kecilnya jumlah pemanfaatan aset daerah karena Pemkab Pangandaran merupakan daerah otonom baru yang yang baru melakukan pemekaran pada tahun 2012, sehingga aset yang dilimpahkan kekuasaannya yang juga bersifat idle belum sebanyak Pemda lain. Kabupaten Pangandaran hanya tergantung pada pemanfaatana aset-asetnya yang terletak di kawasan wisata.

4.1.1.3. Hasil Analisis Deskripsif Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4: Pendapatan Asli Daerah TA 2014
27 Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No.	Instansi	Anggaran	Realisasi	%
1	Kabupaten Bandung	583.782.229.947,58	702.045.372.759,08	102,33
2	Kabupaten Bandung Barat	254.795.835.592,00	248.697.185.722,70	101,18
3	Kabupaten Bekasi	1.290.412.792.982,00	1.547.787.549.382,00	119,94
4	Kabupaten Bogor	1.481.027.789.000,00	1.712.937.376.136,16	115,66
5	Kabupaten Ciamis	161.636.566.519,00	182.320.228.014,00	112,80
6	Kabupaten Cianjur	385.119.931.061,60	411.538.567.542,95	106,86
7	Kabupaten Cirebon	424.593.340.403,00	452.870.109.028,00	106,66
8	Kabupaten Garut	324.329.660.481,00	373.261.713.306,00	115,09
9	Kabupaten Indramayu	284.472.232.000,00	328.116.166.964,00	115,34
10	Kabupaten Karawang	836.464.055.855,00	909.158.490.944,00	108,69
11	Kabupaten Kuningan	185.714.311.741,00	202.517.821.129,00	109,05
12	Kabupaten Majalengka	198.122.446.078,00	223.120.890.621,00	112,62
13	Kabupaten Pangandaran	46.323.540.943,00	32.473.188.880,00	70,10
14	Kabupaten Purwakarta	459.349.229.156,00	293.833.261.345,00	63,97
15	Kabupaten Subang	206.423.025.875,00	262.614.860.828,00	127,22
16	Kabupaten Sukabumi	411.643.077.000,00	457.059.973.434,86	111,03
17	Kabupaten Sumedang	260.719.911.434,66	301.900.842.760,30	115,76
18	Kabupaten Tasikmalaya	152.337.814.551,00	154.255.170.573,00	101,26

19	Kota Bandung	1.808.509.055.075,00	1.716.057.298.378,00	94,89
20	Kota Banjar	103.638.432.277,00	118.592.601.620,00	114,43
21	Kota Bekasi	1.170.134.918.800,00	1.205.265.728.279,55	103,00
22	Kota Bogor	483.014.420.704,00	544.835.708.254,00	112,80
23	Kota Cimahi	207.829.160.605.95	227.949.120.180,56	109,68
24	Kota Cirebon	265.668.901.051,00	298.540.660.324,00	112,37
25	Kota Depok	638.584.271.255,45	659.173.522.492,23	103,22
26	Kota Sukabumi	244.768.896.910,00	258.467.192.313,00	105,60
27	Kota Tasikmalaya	230.647.636.948,00	253.450.505.778,21	109,89

Sumber: LHP LKPD Pemerintah Daerah

Dilihat dari tingkat realisasi yang telah dicapai tiap-tiap pemkab dan pemkot di atas, hampir semua telah mencapai tingkat realisasi dari target yang telah dianggarkan. Dan ada 3 Pemda yang tidak mencapai tingkat realisasi PAD 100% yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung.

Kabupaten Purwakarta yang memiliki tingkat realisasi PAD paling rendah yanitu hanya sebesar 63,97%, dikarenakan masih banyak piutang yang belum tertagih atau belum terealisasi oleh Pemkab Purwakarta.. Sedangkan untuk Pemkab Pangandaran yang merupakan Daerah Otonom Baru, Realisasi PAD sebesar 70,10% masih dirasa cukup baik. Karena target dari sumber-sumber yang menjadi unggulan Kabupaten Pangandaran dari Pajak Hotel dan Restoran di wilayah-wilayah wisata telah melebihi target yang ditetapkan. Seperti dari pajak hotel di wilayah objek wisata pantai Pangandaran.

4.1.2. Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi dikemukakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien-kofisien regresi tidak bias dan mendekati keadaan yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini maka asumsi yang akan diuji adalah asumsi normalitas, Heterokedastisitas dan Multikolinieitas.

1. Uji Normalitas
   Untuk mendeteksi ada tidakanya pelanggaran asumsi normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan metode uji *Kolmogorov-Smirnov Test* Berdasarkan output hasil dari pengujian normalidas data yang telah dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics v.23, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.164 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang kita uji berdistribusi normal. Dengan kata lain asumsi normalitas data terpenuhi.
2. Uji Multikolinieritas
   Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factors* (VIF). Dari data yang disajikan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics v.23 terlihat bahwa nilai Tolerance yang diperoleh kedua variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukan bahwa diantara kedua variabel bebas tidak memiliki korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.
3. Uji Heteroskedastisitas
   Untuk mendeteksi Heteroskedastisitas akan dilakukan dengan metode Uji Glejser dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics v.23. diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Manajemen Aset (X) sebesar 0,681 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dan untuk variabel Total Pemanfaatan Aset Daerah (Y) sebesar 0,931 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi Heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan data bersifat homokedastisitas

4.1.2.2. Analisis Jalur

Hasil analisis verifikatif Analisis Jalur dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics v.23 mengenai pengaruh manajemen aset terhadap Total Pemanfaatasn Aset Daerah dan implikasinya terhadap pendapatan asli daerah 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

4.1.2.2.1. Manajemen Aset Terhadap Total Pemanfaatan Aset Daerah

1. Nilai koefisien jalur pada struktur ini adalah 0,452, 452 yang berarti masuk kategori moderat/cukup karena berada diantara 0,41-0,60, dengan nilai positif.
2. Nilai Koefisien Determinasi sebesar 0,204, Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Manajemen Aset memberikan pengaruh sebesar 20,4% terhadap Total Pemanfaatan Aset Daerah, sementara sisanya merupakan pengaruh faktor lain.
3. Pada pengujian hipotesis, karena data yang digunakan merupakan data sensus atau data dari seluruh populasi maka pengujian hipotesis langsung di bandingkan dengan 0. Karena koefisien jalur 0,452 tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Manajemen Aset berpengaruh terhadap pada Total Pemanfaatan Aset Daerah pada 27 Pemerintah daerah di Jawa Barat.

4.1.2.2.2. Total Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Nilai koefisien jalur pada struktur ini adalah 0,282 dengan nilai positif. Nilai korelasi berada dalam kelas interval antara 0,21-0,40 termasuk kategori hubungan yang Rendah.
2. Untuk pengaruh secara parsial Total Pemanfaatan Aset Daerah memberikan total pengaruh sebesar 15.79% (7,95% pengaruh langsung).
3. Pada pengujian hipotesis, karena data yang digunakan merupakan data sensus atau data dari seluruh populasi maka pengujian hipotesis langsung di bandingkan dengan 0. Karena koefisien jalur 0,282 tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Total Pemanfaatan Aset Daerah berpengaruh terhadap pada Pendapatan Asli Daerah pada 27 Pemerintah daerah di Jawa Barat.

4.1.2.2.3. Manajemen Aset Terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil penelitian menunjukan Manajemen Aset memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,615dengan nilai positif dan dalam kelas interval antara 0,61-0,80 termasuk dalam kategori hubungan yang Erat.
2. Untuk pengaruh secara parsial Manajemen Aset memberikan total pengaruh sebesar 45.7% (37.8% pengaruh langsung)
3. Pada pengujian hipotesis, karena data yang digunakan merupakan data sensus atau data dari seluruh populasi maka pengujian hipotesis langsung di bandingkan dengan 0. Karena koefisien jalur 0,615 tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Manajemen Aset berpengaruh terhadap pada Pendapatan Asli Daerah pada 27 Pemerintah daerah di Jawa Barat.

4.1.2.2.4. Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Besar hubungan Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 0,784 dengan nilai positif. Berada pada interval 0,60-0,799 termasuk pola hubungan yang erat
2. Untuk besar kontribusinya yaitu sebesar 61,4%, sedangkan sisanya sebesar 38,6% merupakan pengaruh faktor lain.
3. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa koefisien jalur dari kedua variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,615 dan 0,282 tidak sama dengan nol. maka disimpulkan bahwa Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Pendapaatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Manajemen Aset Terhadap Total Pemanfaatan Aset Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Manajemen Aset Berpengaruh terhadap Total Pemanfaatan Aset Daerah dilihat dari koefisien korelasi antara Manajemen Aset dengan Total Pemanfaatan Aset Daerah dengan nilai koefisien jalur 0,452, jika diinterpretasikan menurut tingkat keeratan korelasi dalam Umi Narimawati (2010:52) maka erat korelasi Manajemen Aset terhadap Total Pemanfaatan Aset Daerah adalah moderat/cukup karena berkisar antara 0,41-0,60 dan arah hubungannya positif, ini berarti apabila Manajemen Aset meningkat maka Total Pemanfaatan Aset Daerah akan meningkat juga. Jika dilihat dari nilai koefisien determinasi dengan rumus $\rho_{YX}{}^2 * 100\% = r_{XY}{}^2 * 100\%$, pengaruh manajemen aset terhadap total pemanfaatan aset daerah sebesar 20,4%.

Hubungan positif ini menjelaskan teori berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pelaksanaan manajemen aset daerah harus berdasarkan pada 6 asas pengelolaan barang milik Negara/daerah, asas tersebut antara lain asas kepastian nilai. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah. Dengan terpenuhinya asas kepastian nilai ini, maka optimalisasi pemanfaatan aset milik Negara dan penerimaan daerah akan semakin baik sejalan dengan pengelolaan aset yang baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayanti (2010) yang menyatakan bahwa kegiatan manajemen aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah. Hasil penelitiannya mengindikasikan jika terjadi peningkatan manajemen aset asset daerah menyebabkan peningkatan pemanfaatan aset daerah. Lalu penelitian dari Yusuf Simunapendi (2014), dalam penelitiannya mengatakan bahwa Manajemen Aset (Inventarisasi, Legal Audit dan Penilaian) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan Aset pemerintah daerah, artinya jika faktor manajemen aset mendapatkan nilai tinggi maka begitu pula dengan hasil dari pemanfaatan aset daerah.

4.2.2. Total Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukan bahwa Total Pemanfaatan Aset Daerah memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,282 Nilai korelasi berada dalam kelas interval antara 0,21-0,40 termasuk dalam kategori hubungan yang Rendah. Untuk pengaruh secara parsial Total Pemanfaatan Aset Daerah memberikan total pengaruh sebesar 15.79% (7,95% pengaruh langsung), dengan nilai positif, artinya jika hasil penerimaan dari total pemanfaatan aset daerah tinggi maka pendapatan asli daerah pun akan tinggi.

Berdasarkan penelitian diperoleh nilai koefisien jalur Total Pemanfatan Aset Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,282. Karena nilai koefisien jalur Total Pemanfatan Aset Daerah tidak sama dengan dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa Total Pemanfatan Aset Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Dengan arah pengaruh yang positif, Hal ini mempertegas pernyataan dari Mahmudi (2010:152), yang menjelaskan bahwa pemanfaatan aset daerah disamping mendayagunakan juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan terhadap daerah dan mengurangi beban anggaran.

Hasil dari penelitian yang menunjukan pengaruh positif ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Posner et al (2009), menjelaskan bagaimana pengaruh kegiatan pemanfaatan aset daerah terhadap pendapatan asli daerah, berupa public-private-partnership (kemitraan publik-swasta) yang baik dan maksimal dapat memberikan manfaat nyata dalam mengatasi pembiayaan yang lebih tinggi dan pembagian resiko, yang berdampak pada peningkaan output dengan biaya yang lebih rendah sehingga optimalnya pendapatan asli daerah.

4.2.3. Manajemen Aset Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukan Manajemen Aset memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,615 dan dalam kelas interval antara 0,61-0,80 termasuk dalam kategori hubungan yang Erat. Untuk pengaruh secara parsial Manajemen Aset memberikan total pengaruh sebesar 45.7% (37.8% pengaruh langsung), dengan nilai positif, artinya jika Manajemen aset daerah baik maka pendapatan asli daerah pun akan tinggi.

Berdasarkan penelitian diperoleh nilai koefisien jalur Manajemen Aset terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,615. Karena nilai koefisien jalur Manajemen Aset tidak sama dengan dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa Manajemen Aset berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Dengan arah pengaruh yang positif, Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Olga Kaganova & Mihaly Kopanyi dalam buku Municipal Finance (2014:280). Dijelaskan:

> "*No municipality would exist or survive without a sufficient portfolio of assets, which it needs to fulfill its various vital functions. The main reasons why managing assets should be central to local governments are … source of revenue, Government property and asset can be a major source of revenues, whether one-time, as a sale of surplus property, or recurrent, including leasing land and commercial properties or granting concessions for operating municipal parking lots."*

Hasil dari penelitian yang ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risambessy (2009), menjelaskan kinerja manajeme aset daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, kondisi ini menggambarkan bahwa peranan daripada hasil pengelolaan aset daerah dengan pola pemberdayaan yang cukup terkendali dapat memebrikan sumbangsih pendapatan yang cukup berarti terhadap pendapatan asli daerah. Lalu dari Lora Devinawati (2011), pengaruh implementasi manajemen aset terhadap PAD dijelaskan sebagai berikut: Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan bahwa faktor manajemen aset yang dikemukakan oleh Mardiasmo yaitu dengan mengidentifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, telah memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

4.2.4. Manajmen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa koefisien jalur dari kedua variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,615 dan 0,282 tidak sama dengan nol. maka disimpulkan bahwa Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Pendapaatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

Besar hubungan Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 0,784 yang berada pada interval 0,60-0,799, artinya Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah memiliki hubungan yang kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Untuk besar kontribusinya yaitu sebesar 61,4%, sedangkan sisanya sebesar 38,6% merupakan pengaruh faktor lain seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Manajemen Aset berpengaruh terhadap Total Pemanfaatan Aset Daerah

Keeratan korelasi pada hubungan ini adalah 0,452, jika diinterpretasikan menurut tingkat keeratan korelasi dalam Umi Narimawati (2010:52) maka erat korelasi Manajemen Aset terhadap Total Pemanfaatan Aset Daerah adalah moderat/cukup karena berkisar antara 0,41-0,60 dan arah hubungannya positif dan memiliki hubungan positif artinya apabila Manajemen Aset baik maka Total Pemanfaatan Aset Daerah akan baik pula. Persentase koefisien

determinasi Manajemen Aset terhadap Manajemen sebesar 20,4 %. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayanti (2010) yang menyatakan bahwa kegiatan manajemen aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah.

Hasil penelitiannya mengindikasikan jika terjadi peningkatan manajemen aset asset daerah menyebabkan peningkatan pemanfaatan aset daerah. Lalu penelitian dari Yusuf Simunapendi (2014), dalam penelitiannya mengatakan bahwa Manajemen Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan Aset pemerintah daerah, artinya jika faktor manajemen aset mendapatkan nilai tinggi maka begitu pula dengan hasil dari pemanfaatan aset daerah.

Untuk kondisi di lapangan hubungan positif atas Manajemen aset yang tidak baik berimbas pada pemanfaatan aset yang juga tidak baik, tercermin pada fenomena yang terjadi pada pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2014 BPK melaporkan ada aset senilai Rp. 4 triliun yang bermasalah bahkan hingga pemeriksaan seluruhnya selesai sampai diterbitknnya LHP LKPD aset yang bermasalah milik Pemkot Bandung lebih banyak lagi, hingga lebih dari 80% dari total aset yang dimiliki masih dikelola dengan kurang memadai. Buruknya manajemen aset Pemkot Bandung berimbas pada penerimaan dari total pemanfaatan aset daerah. Dari permasalahan utang sewa Sabuga oleh ITB yang belum selesai hingga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas pemanfaatan aset tanah dan Mesjid Pusdai, SOR dan GOR Dispora, piutang dan denda sewa tanah dan bangunan yang belum tertagih dan masih banyak lagi. jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki Pemkot bandung hanya memanfatkan aset sebesar 0.002% dari total aset. Berbeda dengan Pemkot Banjar yang mampu memanfaatkan aset nya sebesar 2% dari total aset yang dimiliki dengan manajemen aset yang baik (aset dikelola dengan cukup memadai sebesar 99.8%).

2. Total Pemanfaatan Aset Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Keeratan korelasi pada hubungan ini adalah 0,282 Nilai korelasi berada dalam kelas interval antara 0,21-0,40 termasuk dalam kategori hubungan yang Rendah dan memiliki arah hubungan yang positif artinya jika hasil penerimaan dari total pemanfaatan aset daerah tinggi maka pendapatan asli daerah pun akan tinggi. secara parsial Total Pemanfaatan Aset Daerah memberikan total pengaruh sebesar 15,8% (7,95% pengaruh langsung), sisanya merupakan faktor lain diantaranya Pajak Daerah, Retisribusi Daera, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lainya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Posner et al (2009), menjelaskan bagaimana pengaruh kegiatan pemanfaatan aset daerah terhadap pendapatan asli daerah, berupa public-private-partnership (kemitraan publik-swasta) yang baik dan maksimal dapat memberikan manfaat nyata dalam mengatasi pembiayaan yang lebih tinggi dan pembagian resiko, yang berdampak pada peningkaan output dengan biaya yang lebih rendah sehingga optimalnya pendapatan asli daerah.

Hubungan positif ini juga menjawab fenomena yang telah dikemukaan sebelumnya bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung yang kurang. Perolehan sewa senilai Rp 8 milyar lebih 0,054% dari total nilai aset disewakan Rp 14,9 trilyun, padahal idealnya minimal pemerintah kota memperoleh pendapatan 5–10% atau Rp. 170 milyar per tahun dari total asset sebesar Rp. 17 Trilyun. Kurang maksimalnya pendapatan dari sewa aset yang hanya bisa di realisasi sebesar 0.054% membuat Pemerintah Kota Bandung kehilangan kesempatan untuk menambah pemasukan PAD sebesar kurang lebih 162 milyar.

3. Manajemen Aset berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah

Keeratan korelasi pada hubungan ini adalah 0,615, berada dalam kelas interval antara 0,61-0,80 termasuk dalam kategori hubungan yang Erat dengan arah hubungan positif, artinya jika Manajemen aset daerah baik maka pendapatan asli daerah pun akan tinggi. memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,615 dan dalam kelas interval antara 0,61-0,80 termasuk dalam kategori hubungan yang Erat. secara parsial Manajemen Aset memberikan total pengaruh sebesar 45.7% (37.8% pengaruh langsung), sisanya merupakan faktor lain seperti pemanfaatan aset daerah dan faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian yang menunjukan pengaruh dengan arah positif ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risambessy (2009), menjelaskan kinerja manajeme aset daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, kondisi ini menggambarkan bahwa peranan daripada hasil pengelolaan aset daerah dengan pola pemberdayaan yang cukup terkendali dapat memebrikan sumbangsih pendapatan yang cukup berarti terhadap pendapatan asli daerah. Lalu dari Lora Devinawati (2011), pengaruh implementasi manajemen aset terhadap PAD dijelaskan sebagai berikut: Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan bahwa faktor manajemen aset yang dikemukakan oleh Mardiasmo yaitu dengan mengidentifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, telah memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah. Penelitian ini juga menjawab fenomena yang telah dikemukaan sebelumnya dalam temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Pemkot Bandung memiliki potensi pendapatan reribusi pengendalian telekomunikasi minimal sebesar Rp. 1.899.2932.437 yang belum dipungut. Hal tersebut terjadi karena kurang bainya pengelolaan aset yang dilakukan oleh Pemkot bandung, terutama dalam aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendataan objek retribusinya. Hal ini tentunya membuat PAD Kota bandung untuk tahun 2014 menjadi kurang maksimal.

4. Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Secara Simultan memiliki hubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat TA 2014, Besar hubungan Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 0,784 yang berada pada interval 0,60-0,799, artinya Manajemen Aset dan Total Pemanfaatan Aset Daerah memiliki hubungan yang kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Bara, dan besar kontribusi nya sebesar 61,4% sisanya sebesar 38,6% merupakan pengaruh faktor lain seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Praktis

Dalam implementasi kegiatan manajemen aset pada pemerintah daerah di Jawa Barat, hendaknya masing-masing Pemerintah Daerah melakukan koordinasi secara terus-menerus dalam menindak lanjuti permasalahan pengelolan aset daerah, terutama rekomendasi dari BPK RI. Rekomendasi BPK merupakan hasil dari penelaahan dan pemeriksaan secara menyeluruh, dengan menindaklanjuti secara bertahap rekomendasi dari BPK, perlahan masalah-masalah manajemen aset yang dimiliki akan berkurang.

Untuk Pemanfaatan Aset Daerah, setiap Pemerintah Daerah harus secara tegas melalui Bidang Aset untuk mengupayakan kejelasan status pemanfaatan aset milik daerah dengan legalitas yang jelas dan informasi yang memadai.

5.2.2. Saran Akademis bagi penelirian selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya agar apat menggunakan faktor-faktor internal lainnya yang kemungkinan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selain Manajemen Aset dan Pemanfaata aset Daerah seperti Pajak Daerah, Belanja Daerah dan lainnya. Selain itu dapat menggunakan faktor-faktor eksternal yang kemungkinan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti Rasio Kemandirian daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan lainnya.

Daftar Pustaka

Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Agung Krisindarto. 2012. *Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 8 (4); 403-411.

Aras Aira. 2014. *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Volume 17 (1); 21-39.

Catherine Farvacque-Vitkovic & Mihaly Kopanyi. 2014. *Municipal Finance*. Washington DC: The World Bank

Eeng Ahman & Epi Indriani. 2007. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.

Jusmin. 2013. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.

Mulalinda, Veronika & S.J, Tangkuman. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA. Volume 2 (1); 521-531.

Siregar Doli. D, 2004, *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tamboto, Laedi., Jenny, M., Mawikere, L. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kbupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA. Volume 2 (2); 755-767.

Hamzah, A.P., Arvam C. Djohansjah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. 2010. *Modul Pemanfatan Barang Milik Daerah*. Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuanan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Hasfi, Nyemas., Martoyo, Dwi Haryono. 2013 *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jurnal Imlu Administrasi Negara. Volume 1 (1).

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Yusuf Simunapendi. 2014. *Pengaruh Faktor-Faktor manajemen Aset Tetap Terhadap Pemanfaatan (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah*. Tesis. Yogyakarta: Ekonomika Pembangunan. Universitas Gajah Mada.

Endang Widayanti. 2010. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasasi Pemanfaatan Aset tTetap Pemerintah Daerah*. Tesis. Surakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.

Paul Posner, Shin Kue Ryu, Ann Tkachenko. 2009. *Public-Private Partnerships: The Relevance of Budgeting*. OECD Journal on Budgeting. Volume 9 (1).

Richard Izaac Risambessy. 2009. *Analisis Manajemen Aset Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupatne Lamongan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Volume 6 (1); 183-239

Lora Devinawati. 2011. *Strategi Optimalisasi Aset Daerah di Sektor Pariwisata Kabupaten Kerinci Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*.. Skripsi. Padang: Faultas Imlu Sosial dan Politik, Universitas Andalas

_____.*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.